



PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK

POLITICAL PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN PUBLIC POLICY MONITORING

**Olivia Rizka Vinanda¹, Selis Setia Asih², Salwa Rizki Kusuma³, Bella Shapira Minata⁴,
Rozikin Akbar⁵, Irfan Gynansiar⁶**

¹⁻⁶ UIN Raden Intan Lampung

Email: oliviav24@gmail.com¹, selissetia8864@gmail.com², salwavivo43@gmail.com³,
bellasapiraminata@gmail.com⁴, akbarrozik100@gmail.com⁵, irvangynansia@gmail.com⁶,

Article Info

Article history :

Received : 21-05-2025

Revised : 23-05-2025

Accepted : 25-05-2025

Published : 27-05-2025

Abstract

Many people are unable to take public action to improve mechanisms that can be achieved through policy implementation, communication, dialogue and consultation. The use of technological information and social media allows participants to obtain important information relevant to the public. The effectiveness of the work is ephemeral, but literary and political strategies can no longer be surpassed. They tell themselves that you must follow the rules.

Kata Kunci: *Participation, Society, Community participation, Public policy*

Abstrak

Masyarakat sipil terlibat aktif dalam memantau kebijakan publik melalui berbagai mekanisme seperti pemantauan implementasi kebijakan, pelaporan pelanggaran, dialog dengan pemerintah dan advokasi. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang partisipasi dan mempercepat penyebaran informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Namun efektivitas pengawasan tersebut dipengaruhi oleh tingkat literasi politik masyarakat, kecukupan akses informasi, dan dukungan regulasi pemerintah.

Kata kunci: *Partisipasi, Masyarakat, Partisipasi masyarakat, Kebijakan publik*

PENDAHULUAN

Pada masa Pemerintah Orde Baru berkuasa di Indonesia, pengambilan kebijakan publik sering kali dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah secara *teknokratis*. Selain itu proses pembuatan kebijakan juga sering dilakukan semata-mata bersandar pada orang-orang ahli yang ada di pusat dengan kurang memperhitungkan aspirasi masyarakat di daerah, bahkan tidak melibatkan pemerintah lokal. Mobilisasi sosial dengan kekuatan birokrasi sering kali mendominasi penetapan kebijakan. Akibatnya, masyarakat selalu menjadi tertekan dan tidak mampu menumbuhkan inisiatif lokal secara mandiri karena mereka telah menjadi *the real silent majority*. Namun, pada saat era reformasi bergulir, terjadilah ledakan partisipasi. Akan tetapi karena secara kultural dan institusional masyarakat kita belum memiliki pengalaman berdemokrasi maka ledakan partisipasi tersebut justru sering mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif dan destruktif (Budiman, 2001).

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan



pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitas masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu, bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Sering kali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses berikutnya melakukan upaya Kelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Sebuah catatan penting yang harus dimengerti dari adanya upaya peningkatan peran serta masyarakat di sini ialah, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tentunya mengingatkan kembali kepada sebuah konsep masyarakat madani (*civil society*), di mana merupakan sebuah masyarakat yang memiliki kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bebas dari rasa takut, dan senantiasa mengembangkan kerja sama yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga muncul inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sirajudin dkk, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena partisipasi politik masyarakat sipil dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan proses-proses partisipasi masyarakat pada kebijakan publik. Dengan metode ini, peneliti berusaha mengungkap makna di balik tindakan politik dan narasi yang berkembang dalam ruang publik .

Data yang di kumpulkan dari berbagai sumber skunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional. Buku akademik, artikel berita darimedia massa terpercaya, serta laporan-laporan penelitian dari lembaga dan organisasi masyarakat sipil. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah literatur yang sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji.

Selanjutnya, data di analisis secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dan kebijakan publik , sementara analisis bertujuan untuk menilai dampak partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Validasi data diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkroscek informasi dari berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang objektif dan mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan hal tentang berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta, peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai hingga demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi pada publik, tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara.

Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik. Sedangkan rakyat dikondisikan ke arah apatisisme. Apatisme sebenarnya merupakan produk sosial, ekonomi dan pengaturan politik tertentu, seperti dimasa orde baru, berbagai regulasi digunakan untuk membandingkan partisipasi politik rakyat. Rakyat tidak bebas berekspresi dan berorganisasi. Adanya perbedaan pendapat, kritik dan protes masa dikendalikan dengan teror, kekerasan dan bentuk-bentuk represi lainnya, serta menjadi subjek dalam menentukan arah masa depan masyarakatnya.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Partisipasi Masyarakat

Sebenarnya konsep atau istilah Partisipasi sangat sering. Telah lama dikenal dalam berbagai literatur sains. Namun sebagai sebuah konsep dan praktik operasional, hal ini baru saja dimulai Sejak tahun 1970an, Ketika beberapa organisasi internasional Mempromosikan praktik partisipatif Dalam perencanaan dan implementasi mengembangkan. Ada beberapa bentuk atau jenis partisipasi, terutama ketika Terkait dengan latihan membaca Membangun masyarakat yang demokratis, Hal ini meliputi: 1) partisipasi politik dan 2) Partisipasi sosial.

Partisipasi politik sering kali dipahami sebagai interaksi antara individu atau kelompok, biasanya partai politik, dengan pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi politik kerap diasosiasikan dengan sistem demokrasi, representasi, dan keterlibatan yang tidak langsung. Sementara itu, partisipasi sosial sering kali diartikan sebagai penglibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan. Bentuk partisipasi ini sering kali diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Dengan demikian, partisipasi sosial sering dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam gotong



royong untuk mendukung proyek pembangunan negara yang bersifat mandiri dari masyarakat, meskipun dalam praktiknya, partisipasi sering kali dilihat sebagai tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah dan bukan sebagai hak masyarakat untuk menerima informasi serta dukungan dari pemerintah.

Partisipasi sosial lebih tepat diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan kedalam sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh berbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan. Dalam pengertian ini partisipasi dikemukakan di luar negara atau lembaga-lembaga formal pemerintahan. Sebab sifatnya yang berada di luar lembaga formal pemerintahan, lalu konsep ini dapat disebut sebagai partisipasi sosial. Selain itu juga, partisipasi sosial ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama dipadang sebagai konsultasi atau pengambilan keputusan didalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pemersatuan serta evaluasi program.

Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik merujuk pada keputusan, aturan dan segala program yang telah di rumuskan oleh pemerintahan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakn ini dapat mencakup dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur. Didalam proses pembuatannya, kebijakan publik harus dilandaskan pada analisi yang mendalam dan serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar hasilnya dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembuatan kebijakn idealnya harus mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat agar kebijakn yang dihasilkan bersifat inklusif serta adil, namun kenyataannya seringkali kebijakan publik dibuat tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang luas, hal ini yang mengakibatkan kesenjangan anantara apa yang telah di rencanakan oleh pemerintah dan apa yang telah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Ada dua pola yang dapat dilakukan dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat untuk dalam pembuatan kebijakan publik d era demokratisasi seperti yang sedang bergulir di tanah air akhir-akhir ini, yaitu tentang partisipasi tidak langsung, seperti partisipasi melalui media massa dan partisipasi langsung dengan menggunakan struktur mediasi. Meskipun boleh diakui bahwa pola-pola partisipasi ini masing-masing memiliki keunggulannya dan kelemahannya. Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi manipulasi (bersifat manipulatif) dan partisipasi konsultatif. Partisipasi dapat dikatakan manipulatif karena pemerintahan memberikan informasi yang keliru kepada masyarakat publik, namun menurut Suhirman menyatakan bahwa para praktisi menerima bahwa konsep manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Partisipasi yang bersifat konsultatif adalah partisipasi diaman pemerinatah meminta saran dan kritik pada sebelum keputusannya ditetapkan, namun sayangnya konsultasi ini seringkali hanya bersifat formalitas atau untuk diperalat melegitimasi belaka saja. Karena memang pada kenyataannya adalah saran dan kritik masyarakat tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi melalui yang melalui media massa termasuk bentuk partisipasi tidak langsung, media komunikasi yang secara prinsip terbagi menjadi dua bentuk yaitu, media cetak (koran,



majalah, tabloid, dan lain sebagainya) dan elektronik (radio, televisi, internet, dan sebagainya). Kedua bentuk media komunikasi ini sebagai konsekuensi yang secara terselubung yang memiliki kepentingan ekspansif untuk memperluas wilayah komunikasi, meningkatkan budaya-budaya, mengikat berbagai kepentingan dan *space binding culture*, namun memang harus diakui bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas peran masyarakat dalam partisipasi politik.

Proses partisipasi politik tidak lagi sekedar melalui diskusi langsung yang terkait oleh dimensi ruang, tetapi juga tidak terikat oleh dimensi waktu, di era sekarang juga sering diselenggarakan diskusi publik melalui *talk show* di radio atau di televisi yang umumnya bersifat interaktif. Hal ini sudah jelas merupakan sebuah proses politik yang dimediasi oleh teknologi komunikasi elektronik. Sistem politik demokrasi dapat memperoleh dukungan dengan perkembangan teknologi komunikasi karena proses politik dapat di pindahkan dari ruang publik fisik ke ruang publik cetak dan elektronik yang kemudian menghasilkan fenomena *online politic*. Perluasan ruang politik akibat kemajuan teknologi komunikasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu cara untuk semakin mengefesienkan lembaga politik guna untuk mendukung demokrasi.

2. Partisipasi Langsung

Partisipasi langsung dapat di definisikan sebagai partisipasi yang melibatkan banyak orang memanfaatkan ruang publik fisik untuk tujuan artikulasi kepentingan. Partisipasi langsung dapat berupa partisipasi yang menepati ruang publik fisik seperti gedung DPR, Balai pertemuan, Lapangan terbuka, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah dengar pendapat yang dilakukan antar warga masyarakat dengan pihak eksekutif atau legislatif di gedung DPR dalam rangka mencapai kesepakatan atas suatu kebijakan publik tertentu. Partisipasi langsung melibatkan warga masyarakat di ruang publik selain untuk memberi masukan kepada eksekutif dan legislatif dalam mengambil kebijakan juga dapat digunakan untuk melakukan tekanan politik terhadap kedua lembaga tersebut. Tekanan-tekanan tersebut berupa permintaan sekelompok orang untuk merealisasikan kepentingan mereka, mengevaluasikan kebijakan tertentu atau membatalkan undang-undang partisipasi dan lain sebagainya. Pada umumnya partisipasi langsung yang menggunakan pengarahannya bertujuan untuk melakukan unjuk rasa diorganisir oleh organisasi sosial atau politik. Oleh sebab itu tidak jarang terjadi bias-bias kepentingan organisasi tertentu atau politisasi kepentingan publik untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Peran Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat adalah mekanisme penting dalam menjaga agar pemerintahan tetap bertanggung jawab (*accountability*) atas kebijakan yang diambilnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peran masyarakat sangat penting dalam pengawasan ini:

1. Akuntabilitas Pemerintah: dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pemerintahan dan mempertanggung jawabkan setiap langkah yang diambilnya. Hal ini mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.



2. **Transparansi:** partisipasi masyarakat memungkinkan terbentuknya sistem informasi yang terbuka, masyarakat dapat memantau alokasi anggaran, implementasi program, dan hasil yang dicapai, sehingga setiap ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan bisa segera terdeteksi.
3. **Keterwakilan Aspirasi Publik:** pengawasan aktif membantu memastikan bahwa kebijakan yang di ambil pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, suara masyarakat yang terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif.
4. **Perbaikan Berkelanjutan:** umpan balik dari masyarakat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sebuah kebijakan yang sudah ada, hal ini dapat menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Tantangan Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Kebijakan Publik

Walaupun peran masyarakat sangat penting, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan terhadap kebijakan publik, antara lain:

1. **Keterbatasan Akses Informasi:** Meskipun pemerintahan telah dibuka akses data melalui portal transparansi, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menginterpretasikan data tersebut, kesenjangan informasi ini dapat mengurangi partisipasi aktif dari kelompok masyarakat tertentu.
2. **Kurangnya Edukasi Publik:** Tidak semua warga negara memiliki pemahaman yang memadai tentang tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan kebijakan, tanpa pemahaman yang baik, kritik dan masukan yang diberikan tidak selalu konstruktif.
3. **Tekanan Politik dan Ekonomi:** Terkadang, pengawasan yang di lakukan oleh masyarakat mendapatkan tekanan dari kepentingan politik atau ekonomi tertentu, kelompok- kelompok tertentu dapat menggunakan kekuatan finansial atau pengaruh politik untuk menghambat pengawasan yang objektif.
4. **Resiko Keamanan dan Intimidasi:** Aktivitas dan anggota organisasi masyarakat sipil sering menghadapi resiko intimidasi atau bahkan kekerasan saat mengungkap penyimpangan dalam kebijakan publik, hal ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat keterlibatan aktif dalam pengawasan.

KESIMPULAN

Pengambilan kebijakan publik yang demokrasi tidak dapat melepaskan diri dari aspek partisipasi masyarakat. Namun sebab masa kekuasaan Orde Baru yang otoriter selama lebih dari 30 tahun tidak mensosialisasikan keterlibatan masyarakat hingga akar rumput dalam proses pengambilan kebijakan publik, maka dari itu masyarakat Indonesia kurang memiliki kemampuan dalam menggalang partisipasi masyarakat secara riil, untuk mewujudkan kebijakan publik yang representatif maka partisipasi masyarakat secara aktif diperlukan mengingat perilaku eksekutif dan legislatif yang sering kali meninggalkan aspirasi rakyat ketika mereka sudah duduk di kursi empuk. Partisipasi rakyat yang secara aktif ini diperlukan disamping sebagai kekuatan kontrol terhadap jalannya kekuasaan juga sebagai sarana masukan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.



Untuk mengatasi ketimpangan akses partisipasi diperlukan sinergi dengan pola partisipasi yang lain, yaitu partisipasi melalui struktur mediasi dan partisipasi rakyat secara langsung. Masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu, berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Melalui pengawasan ini, masyarakat dapat mendorong pemerintahan agar lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan publik, diperlukan sinergi antara pemerintahan dan masyarakat, peningkatan literasi politik serta perluasan akses informasi. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa, pada akhirnya menghasilkan kebijakan publik yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman. 2001. "Negara dan Masyarakat Madani dalam ST Sularso (ed), Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi. Jakarta: Kompas.
- Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sirajuddin dan Solehoddin "Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Praktek Politik Uang Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah", Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama Malang, No.1/Vol.III, Juni2010.
- Suhirman. 2003, "Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan" disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh USAID Jakarta 12 Agustus 2003
- George Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: *Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*, Yogyakarta, CCSS & Pustaka Pelajar.
- W. Lance Bennett & Robert M. Entman, *Mediated Communication in the Future of Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press
- Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Anderson, James E. 2003. *Public Policymaking*, Fifth. USA: Houghton Mifflin Company.
- Andrain, Charles F. 1992. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, (penerjemah Luqman Hakim), Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosisal Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Caiden, Gerald E. 1991. *Administrative Reforms Comes Of Ages*. New York: Walter The Gruyter.
- Dahl, Robert A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* Jilid I dan II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Evers, Hans-Dieter dan Schiel, Tilman. 1990. *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*, terjemahan Aan Effendi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- Indria Samego. *Reformasi Birokrasi dan Aplikasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana STIA Bagasasi*. Tahun 1997.
- Islamy, Irfan, M. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lippman, Walter. 1999. *Filsafat Publik, terjemahan dan kata pengantar A. Rachman Zainuddin*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Organsky, Jfr. 1983. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*, Jakarta: CV Rajawali.
- Permana, Setia. 2003. *Politik Indonesia Konspirasi Elite dan Perlawanan Rakyat*. Bandung: CEPLAS.
- Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Jakarta: Airlangga University Press.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Rush, Michael & Althoff, Phillip. 1990. *Pengantar Sosiologi Politik*, alih bahasa Kartini Kartono. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad*.
- Wahab, Solihin Abdul. 200, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi Kedua), Jakarta: Bumi Aksara.